



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala Badan Pelaksana BPKH
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 21 Maret 2022.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Penyusunan Program Masa Sidang IV Tahun 2021-2022
Ketua Rapat	: DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 36 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 12 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Kepala Badan Pelaksana BPKH Beserta Jajaran.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dengan didampingi Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. Dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas “**Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2021 dan Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2022**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Kepala Badan Pelaksana BPKH mengenai:
  - a. Pelaksanaan program dan anggaran Pengelolaan Keuangan Haji BPKH Tahun 2021 sebagai berikut:
    - 1) Dana kelolaan sebesar Rp158,77 triliun atau 101.83% dari target tahun 2021 sebesar Rp155,92 triliun.
    - 2) Pendaftaran jemaah baru sebanyak 270.534 jemaah atau 79.13% dari target tahun 2021 sebanyak 341.896 jemaah.
    - 3) Nilai Manfaat sebesar Rp10,51 triliun atau 113.62% dari target tahun 2021 sebesar Rp9,25 triliun.
    - 4) Realisasi Virtual Account sebesar Rp2,5 triliun.
    - 5) Penyaluran Program Kemaslahatan sebesar Rp180,63 miliar atau 93,11% dari target tahun 2021 sebesar Rp194 miliar.
    - 6) Penggunaan biaya operasional BPKH sebesar Rp210,55 miliar atau 58,88% dari pagu tahun 2021 sebesar Rp357,60 miliar.
  - b. Rencana program dan anggaran Pengelolaan Keuangan Haji BPKH Tahun 2022 sebagai berikut:
    - 1) Dana kelolaan sebesar Rp156,23 triliun.
    - 2) Pendaftaran jemaah baru sebanyak 450.000 jemaah.
    - 3) Nilai Manfaat keuangan haji sebesar Rp9,07 triliun.
    - 4) Alokasi Virtual Account sebesar Rp1,7 triliun.
    - 5) Program Kemaslahatan sebesar Rp230 miliar.
    - 6) Biaya operasional BPKH sebesar Rp398 miliar.
2. Komisi VIII DPR RI akan melakukan rapat pada forum panitia kerja secara khusus dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk membahas lebih rinci mengenai masukan atas komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M.
3. Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji, Komisi VIII DPR RI meminta BPKH untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Mempertahankan capaian kinerja Laporan Keuangan BPKH selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
  - b. Mengoptimalkan capaian nilai manfaat keuangan haji sebagai upaya meningkatkan kesiapan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
  - c. Meningkatkan sinergi dan kerja sama antara BPKH dengan Kementerian Agama RI, khususnya dalam perencanaan komponen BPIH.

- d. Menyampaikan data pengelolaan keuangan haji untuk jemaah lunas tunda tahun 2020 dan 2021 akibat adanya pembatalan keberangkatan calon jemaah haji, data realisasi investasi BPKH di luar negeri, dan data sebaran program kemaslahatan sebagai bahan pengawasan.
- e. Melakukan kajian lebih dalam mengenai desain virtual account yang lebih mendekati kepada aspek keekonomian sebagai konsekuensi pengelolaan keuangan haji untuk sustainabilitas keuangan haji.
- f. Memprioritaskan realisasi bantuan Program Kemaslahatan sesuai dengan aspirasi daerah.
- g. Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi publik mengenai kebijakan pengelolaan keuangan haji.

### III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.40 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,**

**DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si**